



KEPAHIANG

SENIN, 10 OKTOBER 2022

SUMBER BERITA

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Sewa Auditor Independen, Audit Keuangan PDAM

KEPAHIANG - Pemerintah Kabupaten (Pembka) Kepahiang mengalokasikan Rp 100 juta untuk menyewa jasa auditor independen. Tugasnya untuk mengaudit keuangan PDAM Tirta Alami Kepahiang akhir tahun nanti.

Ini untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, terkait laporan keuangan perusahaan milik daerah itu.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos menjelaskan, anggaran Rp 100 juta tersebut dialokasikan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepahiang.

"Dengan telah dialokasikannya anggaran melalui APBDP, maka secara otomatis audit terhadap PDAM harus terealisasi di tahun ini juga, atau paling lambat Desember mendatang," ungkap Jono.

Meski anggaran untuk jasa auditor independen dialokasikan oleh Pembka Kepahiang, namun untuk mencari akuntan publik yang akan menjadi auditor independen merupakan kewenangan dari PDAM. Termasuk materi apa saja yang akan diaudit sesuai dengan LHP-BPK Tahun Anggaran 2021 lalu.

"Kita hanya memberikan dana hibah kepada PDAM agar mereka bisa membayar akuntan publik. Anggaran yang dialokasikan pun sesuai dengan permohonan pihak PDAM yakni Rp

100 juta," beber Jono.

Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang Andrian Defandra, SE, M.Si mengatakan jika nantinya pihak PDAM yang menentukan akuntan publik yang akan melakukan audit, maka audit yang dilakukan tersebut terkesan tidak objektif.

Jadi pihaknya menyarankan kepada Pembka Kepahiang untuk memilih akuntan publik yang benar-benar independen untuk melakukan audit arus kas di PDAM, bukan akuntan publik yang kenal dengan PDAM.

"Agar nanti kiranya tahu seperti apa permasalahan PDAM ini. Agar nanti Pembka Kepahiang bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk permasalahan PDAM, sampai nanti-

nya dibentuknya PDAM menjadi Perumda. Jangan sampai anggaran audit yang telah dialokasikan menjadi sia-sia. Kami minta Bupati sendiri yang bisa menentukan akuntan publik yang benar-benar independen. Agar persoalan yang ada di PDAM bisa segera dibenahi dengan baik," singkat Aan.

Berdasarkan LHP-BPK Tahun Anggaran 2021, nilai penyertaan modal Pembka Kepahiang yang dicatat dalam laporan keuangan Pembka Kepahiang per 31 Desember 2021, Rp 23.157.202.665,00.

Nilai penyertaan modal Pembka Kepahiang pada PDAM Tirta Alami ini juga sudah didukung dengan rekonsiliasi penyertaan modal PDAM yang dilakukan PDAM Tirta Alami dengan BKD pada tanggal 3 Maret 2022.

Namun nilai kerugian PDAM Tirta Alami belum dapat diyakini karena belum diaudit oleh auditor independen. Laporan keuangan PDAM Tirta Alami Tahun Buku 2021 menyajikan informasi bahwa terdapat penyertaan pemerintah pusat yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp 23.481.329.000,00.

BPK meminta dokumen terkait penyertaan pemerintah pusat kepada Direksi PDAM Tirta Alami namun belum dapat diberikan hingga 18 April 2022 lalu.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian saldo investasi permanen pada PDAM Tirta Alami sebesar Rp 13.637.232.411,06 berpotensi tidak sesuai kondisi senyatanya.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Direksi PDAM Tirta Alami tidak mengalokasikan dana untuk audit. Atas permasalahan tersebut, Pembka Kepahiang akan meminta PDAM Tirta Alami untuk dapat diaudit oleh auditor independen. (sly)